

ANALISIS HAMBATAN-HAMBATAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PETANI REMPAH DI SUMENEP

Shela Auliyah Rahmah¹

Citra Nurhayati²

¹Universitas Trunojoyo Madura (Indonesia);

¹shelaauliyah16@gmail.com

²Universitas Trunojoyo Madura (Indonesia);

ABSTRACT

The rapid development of technology has penetrated various aspects of life, including the financial sector. Financial inclusion remains a significant challenge for farmers in Sumenep due to various underlying issues. This forms the basis for the current research, which aims to investigate the barriers to financial inclusion for spice farmers in Sumenep. The research is essential because it will examine the factors hindering financial inclusion. This study adopts a qualitative research approach with a descriptive research design and employs several research techniques, including interviews, observations, and documentation..

Keywords : Financial Inclusion, Spice Farmers.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan perekonomian, inklusi keuangan masih sangat sulit menjangkau petani di Madura. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak masalah-masalah yang menyebabkan inklusi keuangan masih sulit menjangkau petani di Madura. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022 di Jawa Timur, menurut data tersebut jumlah penduduk miskin kabupaten Sumenep berada di angka 206,20 ribu jiwa. Meskipun jumlah tersebut sudah mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 224,73 ribu jiwa. Namun angka tersebut masih terbelang cukup tinggi karena Sumenep menempati urutan ke empat tertinggi dari 38 kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur. Pertumbuhan tersebut terbelang masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional karena persentasenya masih dibawah

standar pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 2,20%.

Pada kalangan ekonomi yang terbelang lemah rata-rata letak permasalahan terdapat pada modal yang minim, hal ini yang membuat seseorang sangat sulit dalam mengembangkan usahanya. Petani di daerah Sumenep sering kali terjebak dalam kebutuhan dalam permodalan, dan untuk mengambil langkah cepatnya seringkali petani meminta bantuan pada rentenir. Banyak dari petani yang tidak terlalu memperhatikan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi kepada rentenir sebelum mereka meminjam uang, karena mengingat kebutuhan yang sangat mendesak. Secara umum saat ini masih banyak para petani yang masih belum paham mengenai pentingnya inklusi keuangan. Masih banyak para petani

yang tidak dapat mengakses bantuan keuangan untuk dapat mengembangkan usaha dalam skala yang cukup besar. Hal ini membuat penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena nantinya akan mengkaji mengenai hambatan-hambatan inklusi keuangan terhadap petani rempah di Sumenep.

Menurut Churchill, et.al (2020) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki penghasilan yang rendah, atau tidak menentu merupakan kelompok yang tidak mampu dalam mengakses layanan keuangan. Padahal dengan mengakses layanan keuangan seseorang akan terbantu dalam merencanakan di masa yang akan datang dan melindungi dari suatu hal yang tidak terduga, karena uang tunai sekarang juga sangat rentan mengalami pencurian. Selain itu, layanan tabungan informal yang terdapat pada kalangan masyarakat sering kali menggunakan biaya administrasi yang cukup besar. Pada dasarnya orang yang berpenghasilan rendah atau miskin tidak dapat menabung dalam bentuk uang tunai, ataupun tabungan yang tersembunyi seperti di bawah kasur, karena ketika memiliki uang maka akan sangat mudah untuk dibelanjakan, hal ini disebabkan mereka hidup dibawah dari tekanan kebutuhan ekonomi.

Ditemukannya berbagai permasalahan di bidang pertanian serta beberapa petani yang masih hidup

dibawah garis kemiskinan karena hasil yang tidak mencukupi, sedangkan kebutuhan permintaan yang semakin bertambah dan peminat tenaga profesi petani yang semakin tidak diminati para generasi muda karena dirasa petani adalah pekerjaan yang tidak bergengsi. Adapun faktor tersebut yang menyebabkan pertanian di Indonesia kurang maksimal bisa dikarenakan infrastruktur, sumber daya manusia, kurangnya literasi keuangan dan sebagainya. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, ditengah dari kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu, para penduduk miskin cukup susah untuk beranjak karena akses keuangan yang dimilikinya sangat rendah.

Penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat agar masyarakat mengetahui mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terhambatnya inklusi keuangan.

INKLUSI KEUANGAN

Berdasarkan dengan situs resmi yang dimiliki oleh Bank Indonesia, Inklusi Keuangan mengacu pada tiga teori lembaga yaitu The Consultative Group to a Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion

(CGAP-GPFI), Financial Action Task Force (FATF) dan Reserve Bank of India. CGAP-GPFI mendefinisikan inklusi keuangan sebagai suatu kondisi saat semua orang dewasa bekerja dan mempunyai akses yang efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan yang formal. Akses yang efektif disini terkait dengan pemberian layanan yang nyaman, bertanggungjawab, dan biaya yang terjangkau untuk masyarakat yang berkelanjutan dan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan secara finansial memilih menggunakan layanan keuangan formal dari pada informal.

Menurut FATF inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses kedalam berbagai layanan jasa keuangan dengan aman, nyaman dan terjangkau oleh semua masyarakat. Sedangkan menurut Reserve Bank of India, inklusi keuangan merupakan proses yang memastikan akses produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan semua lapisan masyarakat terkhusus masyarakat yanag berpenghasilan rendah dengan biaya yanag terjangkau secara adil serta transparann oleh pelaku lembaga.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses layanan keuangan terhadap berbagai lembaga, produk atau jasa keuangan yang

dapat digunakan secara mudah dan aman oleh seluruh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Hal tersebut searah dengan pengertian dari OJK Otoritas Jasa keuangan (2016:3) yang menyebut inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses dalam berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Meningkatkan penyediaan produk atau layanan jasa pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
- c. Meningkatkan penggunaan produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tujuan tersebut dapat tercapai melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif menjadi suatu komponen terpenting didalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendorong program penanggulangan kemiskinan, serta mengurnangi kesenjangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam. Terdapat lima pilar dan Fondasi SNKI dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Perpres SNKI, 2020:10-12) sebagai berikut:

a. Pilar Edukasi Keuangan

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan beserta kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan formal. Berikut aspek yang termasuk kedalam pilar edukasi masyarakat antara lain aspek fitur, manfaat dan resiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk mendorong keterampilan masyarakat dalam perencanaan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.

b. Pilar Hak Properti Masyarakat

Bertujuan untuk dapat meningkatkan suatu akses kredit/ pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal sebagai pemberdayaan masyarakat tersebut.

c. Pilar produk, Intermediasi, dan Saluran Distribusi

Bertujuan untuk dapat meningkatkan akses dan jangkauan masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan.

d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Bertujuan untuk memperluas tata kelola dan transparansi layanan publik dalam penyaluran dana non tunai

e. Pilar Perlindungan Konsumen

Bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan layanan jasa keuangan yang ditawarkan serta harus mempunyai prinsip transparansi, adil, keandalan, kerahasiaan serta informasi masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Selain terdapat pilar-pilar tersebut sebagai sarana untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pilar-pilar tersebut juga harus didukung oleh 3 fondasi sebagai berikut:

a. Kebijakan serta regulasi yang kondusif

Dalam pelaksanaan program keuangan yang inklusif tentu dibutuhkan suatu kebijakan dan regulasi yang kondusif dari pemerintah.

b. Teknologi informasi dan komunikasi

Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi suatu hambatan & dukungan infrastruktur dalam akses layanan jasa keuangan.

c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

Dalam keberagaman keuangan inklusif maka pilar dan strategi dapat dioptimalkan sehingga keuangan inklusif mempunyai fondasi yang kuat dan dapat mencapai inklusi keuangan yang terus meningkat seiring perkembangan ekonomi.

Menurut Organization For Economic Coperation and Developmen atau OECD (2016:90) untuk mengukur tingkat inklusi keuangan dikelompokkan menjadi beberapa indikator yaitu:

a. Tabungan/ Investasi

Indikator tabungan/ investasi adalah bagian dari product holding yang berguna dalam identifikasi produk keuangan yang dimiliki oleh responden. Indikator tersebut dapat mengetahui apakah konsumen sadar akan produk keuangan secara

nasional, dan apakah mereka membuat pilihan produk keuangan.

b. Produk Pembayaran

Indikator produk keuangan merupakan bagian dari product holding yang berfungsi sebagai alat pembayaran suatu barang dan jasa. Indikator ini juga bisa megeplor apakah konsumen sadar tentang produk keuangan secara nasional. Product keuangan juga akan semakin berkembang pesat dengan adanya digitalisasi ekonomi seperti dalam meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan financial technology.

c. Produk Asuransi

Dalam indikator asuransi bertujuan dalam identifikasi produk keuangan yang berupa asuransi yang dimiliki responden mengenai kesadaran akan produk keuangan nasional yang tersedia dan seberapa banyak masyarakat yang mempunyai asuransi.

d. Pinjaman Kredit

Indikator pinjaman kredit bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang menggunakan penyediaan uang. Pinjaman kredit adalah kesepakatan kedua belah pihak antara pihak bank dengan pihak yanag lain dimana pihak peminjam harus melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah bunga sebagai ketidakseimbangan.

e. Pemahaman Produk Keuangan

Indikator ini dapat mencegah kesalahan memilih dan membantu penyedia produk jasa keuangan untuk mengetahui permintaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara penafsiran atau penjelasan dalam bentuk deskripsi dan tidak mengacu pada perbandingan serta pengukuran terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di kecamatan Bluto, Rubaru dan Lenteng karena kecamatan tersebut merupakan salah satu lokasi yang berpotensi untuk menanam rempah khususnya cabe jamu. Sumber penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer yang terdiri dari para petani yang ada di sumenep sedangkan sumber sekunder yang berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penegasan kesimpulan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura. Kabupaten Sumenep memiliki keunikan yaitu kabupaten Sumenep terdiri dari wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah Kabupaten Sumenep) yang terletak di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur dan di antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan. Kabupaten Sumenep memiliki iklim tropis basah dan kering (Aw). Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, musim hujan di Sumenep dimulai dari bulan Desember sampai Maret, dan dilanjut musim kemarau dari bulan Mei sampai Oktober. Kabupaten Sumenep mempunyai rata-rata curah hujan ±1.394 mm. Suhu di Kabupaten Sumenep juga terbilang cukup tinggi. Tercatat suhu tertinggi di kabupaten Sumenep pada tahun 2011 terjadi di bulan September–November (32,7 °C) sebuah suhu yang pas untuk menanam tanaman seperti cabe jamu dan lainnya, sehingga tidak heran warganya berprofesi sebagai petani rempah.

Petani Rempah Di Sumenep

Modal merupakan hal yang cukup krusial dalam keberlangsungan usaha tani. Petani dalam merawat tumbuhan mereka tentunya membutuhkan bibit unggul, pupuk, peptisida dan lainnya

untuk menjaga tanamannya agar tetap subur samapi musim panen tiba. Akan tetapi masalah modal sering menjadi penghambat para petani dalam usahanya. Bibit unggul yang mahal, pupuk yang harganya semakin naik merupakan persoalan yang cukup membebani para petani karena harus menambah lebih modal mereka. Dari sini peran petani sebagai leader dalam usahanya, sangat dibutuhkan kemampuannya untuk mengatur sistem keuangan mereka sehingga modal dan hasil bisa lebih terukur.

Seperti disalah satu kabupaten madura yaitu sumenep, kebanyakan warganya bekerja sebagai seorang petani. Petani rempah menjadi salah satu pekerjaan yang cukup mendominasi di kabupaten sumenep dengan total kurang lebih 251.947 bekeja sebagai seorang petani. Petani rempah di Sumenep di dominasi oleh warga yang berusia tua dengan rentan usia 40 tahun - 60 tahun. Petani rempah menjadi pekerjaan yang banyak diminati oleh penduduk disana karena penanaman serta perawatan yang tergolong mudah. Petani rempah di Sumenep terbilang masih cukup rendah dalam pengetahuan sistem keuangan. Hal ini terbukti disana masih banyak petani yang belum melakukan perencanaan keuangan seperti pendataan pendapatan dan pencatatan pengeluaran. Sehingga tidak sedikit dijumpai disana terdapat

petani rempah yang kesulitan dalam mengatur laba dan modal.

Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan

Menurut Kalsoom Zulfiqar (2016) berpendapat bahwa Inklusi Keuangan dianggap sebagai sarana penting untuk mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusi keuangan memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dengan meningkatkan akses mereka ke peluang ekonomi dan memperluas pilihan mereka, yang pada akhirnya membuat agen ekonomi lebih produktif dan efisien. Inklusi keuangan melalui fintech system menjadi hal yang digadang-gadang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah menggalakkan inklusi keuangan dengan berbagai cara seperti mempromosikan ke berbagai daerah. Namun di lapangan, terdapat hambatan-hambatan yang membuat inklusi keuangan belum berjalan secara optimal dan efisien. Hal ini terbukti dari salah satu petani rempah di Sumenep yang mengatakan bahwa beliau tidak mencoba untuk memanfaatkan pinjaman yang tersedia di baik itu bank atau lainnya yang berkenaan dengan inklusi keuangan.

Petani rempah di Sumenep tidak memanfaatkan inklusi keuangan dalam kegiatan keuangannya dikarenakan

ketidaktahuannya mengenai prosedur, tatacara, dan lain sebagainya terkait inklusi keuangan. Hal ini lah yang menyebabkan mereka menjadi ragu, khawatir, dalam memanfaatkan inklusi keuangan. Hal ini nampak pada hasil wawancara dari seorang petani rempah di sumenep yang bernama pak Sucipto.

"Saya bekerja sebagai petani cabe jamu sudah sekitar 25 tahun, untuk biaya awal yang digunakan dalam kebutuhan bertani saya pinjam kepada keluarga. Karena malas berurusan dengan bank, dan takut terbebani dengan cicilan perbulannya. Saya juga tidak pernah meminjam uang lewat aplikasi di HP karena masih takut dengan hal tersebut. Saya hanya mengikuti arisan bersama dengan warga sekitar daerah, untuk keuntungannya sebagai seorang petani tergantung dari hasil panen. Jika hasil panen sekitar 1 kwintal maka beberapa tidak akan dijual semua kepada tengkulak namun akan disimpan, dan akan dijual apabila membutuhkan. Untuk layanan perbankan sendiri saya tidak mengerti, namun istri saya mempunyai rekening bank yang hanya digunakan untuk transfer uang kepada anak di hari raya saja"

Jadi dari sini dapat dilihat bahwa hambatannya adalah ketidaktahuan masyarakat terkait inklusi keuangan. Masyarakat lebih memilih hal-hal yang masih konvensional dan dianggap lebih memudahkan mereka. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan dari inklusi keuangan yaitu memudahkan masyarakat dengan akses keuangan yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi keuangan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat masih

asing dan takut untuk mencoba inklusi keuangan.

Dalam data tersebut juga terlihat masyarakat yang masih dalam kondisi unbankable. Masyarakat yang unbankable adalah faktor penghambat inklusi keuangan pada petani rempah di Madura. Masyarakat unbankable cenderung tidak merasakan dan tidak membutuhkan layanan perbankan. Mereka melihat bahwa layanan perbankan hanya akan mempersulit dirinya sendiri dan dianggap tidak sebegitu efisien seperti penggunaan uang tunai. Masyarakat unbankable cenderung memilih untuk menuntaskan persoalan kebutuhan secara tunai.

Selain itu, dalam data tersebut juga terlihat bahwa biaya layanan perbankan menjadi hal yang sangat diperhitungkan oleh masyarakat. Masyarakat melihat bahwa layanan jasa keuangan memiliki biaya layanan yang cukup tinggi dan memakan saldo tabungan mereka, sehingga mereka enggan untuk menabung di bank. Tingginya biaya layanan dan bunga yang dirasakan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat-masyarakat kecil merasa lebih terbebani dan lebih memilih hal-hal yang lebih konvensional seperti arisan bersama tetangganya yang dirasa lebih rendah biaya pelayanannya. Hambatan lain yang terlihat pada data tersebut adalah persepsi dan pemahaman mereka terhadap

layanan perbankan, khususnya tentang layanan pinjaman yang terganjal pada beberapa hal, meliputi isu kepercayaan, biaya operasional, dan proses diadopsi.

Hambatan lain inklusi keuangan pada petani rempah di madura adalah cicilan yang dirasa sangat membebani mereka. Hal tersebut membuat mereka lebih memilih untuk menggunakan modal dengan uang mereka sendiri meskipun cenderung lebih terbatas akan tetapi mereka tidak perlu memikirkan cicilan tiap bulannya. Hal tersebut nampak pada hasil wawancara oleh bapak Sucipto salah satu petani rempah di Sumenep.

“Saya memulai bertani dengan menggunakan modal sendiri seadanya, karena tidak mau meminjam bank, tidak mau ribet dengan biaya-biaya administrasi dan juga takut tidak bisa membayar tagihan perbulannya mengingat penghasilan sebagai bertani ini tidak menentu setiap bulannya. Untuk peminjaman melalui aplikasi HP juga tidak pernah menggunakannya karena memang tidak mengerti, rata-rata petani disini juga tidak mengerti mengenai peminjaman melalui HP, karena tingkat pendidikan petani disini juga bisa dibilang masih rendah. Mungkin apabila dijelaskan mengenai keuntungan serta kelemahannya entah itu melalui pemberitahuan, brosur dan bentuk dari peminjaman seperti apa, mungkin beberapa petani disini akan tertarik”.

Data tersebut menjelaskan mengenai alasan mereka enggan untuk meminjam uang di bank karena alasan takut terbebani dengan tagihan perbulannya, sedangkan pendapatan

mereka sendiri tidak menentu. Hal ini tentunya masih jauh dari tujuan pemerintah untuk mengentas kemiskinan melalui inklusi keuangan. Diketahui pemerintah telah memberikan dana secara digital untuk program Keluarga Harapan dan Kartu Prakerja. Ditambah pula bantuan subsidi bunga bagi usaha rakyat dalam bentuk kredit dan non kredit. Pemerintah juga mendorong program Keluarga Harapan sebesar 25 persen kepada 10 juta keluarga. Bantuan modal kerja yang diberikan sebesar 12 juta dalam bentuk bantuan presiden tunai yang disalurkan secara digital melalui transfer rekening dengan masing-masing memperoleh 2,4 juta. Bantuan dan inisiatif pemerintah dalam mempromosikan inklusi keuangan dalam hal ini belum menyasar sepenuhnya oleh penduduk-penduduk pedesaan dan lebih khusus yang berusia lanjut.

Dalam hal ini usaha pemerintah tentunya harus dibarengi dengan infrastruktur yang lebih kuat terutama dalam hal know your client (KYC) untuk mendorong agar dapat mengurangi talent gap dalam layanan keuangan dan tentunya diperlukan ekosistem yang kondusif, kolaborasi lintas sektor dan inisiatif yang terus dilakukan. Dengan ketidaktahuan masyarakat dan minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat, membuat inisiatif dan usaha dari

pemerintah kurang berjalan secara maksimal.

Selain cicilan yang dirasa sangat membebani petani sebagai profesi yang tidak mempunyai penghasilan pasti tiap bulannya, masalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait literasi keuangan kembali dirasakan oleh masyarakat dan juga petani untuk memanfaatkan inklusi keuangan. literasi keuangan sangat berperan penting. Minimnya literasi keuangan yang diterima oleh masyarakat membuat masyarakat menjadi khawatir atau takut untuk mencoba hal-hal baru seperti inklusi keuangan yang sebenarnya akan lebih banyak membantu masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya. Literasi keuangan nyatanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, disamping sebagai media untuk mengenalkan kepada masyarakat, literasi keuangan juga berdiri sebagai panduan nantinya saat masyarakat memilih memanfaatkan inklusi keuangan. Mengingat terdapat juga ancaman keamanan yang meningkat pesat dan telah menjadi tantangan bagi pengguna inklusi keuangan yang berbentuk teknologi keuangan seperti fintech system yang apabila pengguna tidak dibekali dengan pemahaman literasi keuangan yang baik (Stewart dan Jurjens, 2018). Hal tersebut nampak pada hasil wawancara oleh bapak Sucipto selaku petani rempah di Madura.

“Sebelumnya banyak teman yang menawarkan untuk meminjam melalui layanan di bank dan aplikasi yang ada di HP, namun saya masih belum berani untuk meminjam melalui aplikasi tersebut, karena saya masih ragu dan tidak mengerti mengenai prosedur dan persyaratannya, selain itu juga di lingkungan keluarga saya tidak ada yang memakai layanan pinjaman di bank dan melalui dengan aplikasi di HP, hal tersebut juga menambah rasa ragu dan takut saya terhadap model pinjaman tersebut. Jadi saya lebih memilih untuk memakai modal pribadi dalam menjalankan usaha, karena dengan memakai modal pribadi tentunya saya tidak akan merasa terbebani dengan cicilan setiap bulannya”.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi keuangan nasional adalah 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Dari hasil survey tersebut dapat dilihat bahwa terdapat gap yang cukup besar antara literasi keuangan dengan ketersediaan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini membuat minimnya pengetahuan masyarakat terkait sistem keuangan, ketersediaan layanan keuangan dan lainnya. Selayaknya, masyarakat diberikan literasi keuangan melalui penyuluhan atau yang lainnya karena banyak inklusi keuangan ini yang dapat membantu masyarakat seperti yang sedang dikembangkan sekarang yaitu inklusi keuangan berbasis fintech system. Contohnya produk layanan Fintech Lending dapat dimanfaatkan sebagai alat

permodalan bisnis yaitu peer-to-peer lending (P2PL). P2PL merupakan suatu platform Fintech yang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara online. Selain sebagai penyedia dana secara online, peer to peer lending (P2PL) juga memiliki tugas yaitu analisa risiko (Drevs, 2016).

Sebagian besar masyarakat tidak memanfaatkan inklusi keuangan untuk meminjam dana sebagai modal tani mereka dikarenakan mereka masih tidak mengerti mengenai prosedur dan pengoperasiannya. Minimnya pengetahuan karena sedikitnya informasi yang diterima memang menjadi hambatan utama dalam inklusi keuangan. Selanjutnya pada data tersebut dijelaskan bahwa petani rempah tidak meminjam dana sebagai modal usaha melalui dengan memanfaatkan inklusi keuangan, dikarenakan adanya rumor bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Mereka khawatir bunga yang tinggi dari pinjaman modal mereka. Informasi ini diterima oleh masyarakat bisa melalui teman dekat, saudara, atau orang-orang disekitarnya. Hal ini memang menjadi momok dari hadirnya inklusi keuangan. Hal tersebut nampak pada hasil wawancara oleh Pak Ali sebagai pengepul rempah.

“Saya memulai bertani dengan modal yang saya tabung sendiri dan sebagian dari orang tua. Alasan saya tidak ingin meminjam melalui pinjaman bank

ataupun online melalui aplikasi HP karena saya masih dibilang tidak mengerti masalah adminitrasinya dan menurut berita yang saya dengar melalui teman-teman bahwa peminjaman melalui HP memiliki biaya bunga yang cukup besar”.

Pemerintah baru-baru ini mempromosikan inklusi keuangan yang digadang-gadang akan lebih memudahkan masyarakat dalam sistem keuangan mereka yaitu inklusi keuangan berbasis fintech system. Dari adanya hal tersebut maka muncullah pinjam-pinjaman online ilegal yang mematok bunga yang tinggi kepada masyarakat membuat masyarakat menjadi takut untuk beralih dari konvensional menuju ke digitalisasi. Hal ini memang ada bahwa terdapat banyak sekali aplikasi dan platform pinjaman online yang tidak terdaftar dengan izin OJK sehingga aplikasi atau platform tersebut mematok bunga yang sangat tinggi diluar kebijakan dari OJK. Hal ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh masyarakat bila ingin beranjak beralih dari konvensional menuju digitalisasi. Dalam peralihan tersebut masyarakat perlu untuk dibekali literasi keuangan yang cukup sehingga masyarakat mampu untuk memutuskan keputusan yang bijak nantinya dalam menggunakan inklusi keuangan. Bunga yang tinggi menjadi alasan masyarakat enggan memanfaatkan inklusi keuangan. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya benar karena tidak

seungguhnya biaya pelayanan, bunga dari jasa keuangan penyedia inklusi keuangan memiliki biaya yang cukup mahal. Tingkat bunga dan biaya yang diterapkan kompetitif berdasarkan analisis risiko kredit modern sehingga prosesnya relatif lebih mudah dan cepat.

Menurut beberapa informan cicilan kembali menjadi hambatan inklusi keuangan pada petani rempah di Madura. Petani rempah merasa terbebani dengan cicilan tiap bulannya. Hal ini dipertimbangkan dari pendapatan petani yang tidak menentu setiap bulannya. Hal ini selayaknya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memudahkan petani untuk mendapatkan pinjaman modal yang cukup tanpa terbebani bunga tiap bulannya sehingga para petani bisa lebih mengembangkan pertaniannya. Hal tersebut nampak pada hasil wawancara oleh Pak Masrito sebagai Petani Cabe Jamu.

“Saya pernah menggunakan layanan kredit di bank KUR tetapi sudah lama, namun sekarang saya sudah tidak tertarik kembali untuk mengambil pinjaman di bank karena merasa terbebani dengan cicilan setiap bulannya. Sekarang saya lebih memilih untuk memakai uang pribadi karena tidak mau ambil pusing. Namun jika ditanya mengenai peminjaman berbasis aplikasi di HP, saya pernah mengalami pengalaman yang buruk, pernah ada teman saya yang meminjam uang melalui aplikasi di HP, namun nomor yang ia gunakan sebagai pendaftar memakai nomor saya, jadi saya yang selalu ditelpon dan dihubungi untuk segera

membayar tagihan. Nah dari situ saya kemudian merasa ragu dengan prosedur dari peminjamannya yang tidak bagus dan tidak mau berurusan dengan pinjaman online”.

Dari data tersebut juga terjadi sebuah peristiwa dimana diduga bahwa nomor kontak selular salah satu petani rempah terdaftar pada database kontak selular orang dimaksud sebagai peminjam, dan data itu telah diakses serta digunakan tanpa seizin pemiliknya (petani rempah) yang kemudian dihubungi oleh seseorang atau sekelompok orang yang merupakan debt collector dari penyedia jasa pinjaman permodalan secara digital (online), yang memberikan layanan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbagai fintech menawarkan produk pinjaman peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.

Namun, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak.

Kemudahan prosedur yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh seseorang dengan menggunakan data orang lain sebagai jaminan merupakan salah satu kekurangan yang cukup sering terjadi pada platform keuangan Fintech System. Hal inilah yang membuat masyarakat takut dan enggan berurusan dengan digitalisasi lagi. Masyarakat terutama yang usia lanjut lebih memilih sistem keuangan yang bersifat konvensional yang lebih menjamin keamanannya baik itu dari segi keuangan ataupun data diri dan sebagainya. Keamanan menjadi permasalahan yang perlu untuk diperhatikan agar masyarakat bisa merasa aman dan nyaman dalam menggunakannya.

Center for Financial Inclusion mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, terjadinya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Masyarakat yang telah mengetahui lembaga jasa keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga,

produk dan layanan jasa keuangan (A. Wulandari et al., 2020). Ketersediaan akses tersebut meliputi banyak hal seperti pinjaman atau kredit. Kemudahan administrasi menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat inklusi keuangan karena nyatanya banyak penyedia jasa keuangan yang menetapkan persyaratan dan prosedur yang cukup membuat masyarakat rumit. Hal ini tentunya akan menghambat berkembangnya inklusi keuangan. Masyarakat akan cenderung lebih memilih hal yang lebih memudahkan mereka, mengingat terdapat dari mereka yang membutuhkan pinjaman modal cepat. Hal tersebut nampak pada hasil wawancara oleh Pak Sumoto sebagai Petani Merica.

“Saya bertani menggunakan modal sendiri, namun saya juga menggunakan layanan pinjaman pada rentenir yang meminjamkan modal maksimal 3 juta. Alasan saya lebih memilih layanan tersebut karena peminjaman tergolong mudah dan cepat bagi saya. Berbeda dengan layanan pinjaman di bank yang tergolong sulit dan ribet”.

Namun untuk menyikapi hal ini, inklusi keuangan dalam perkembangannya memiliki fintech system. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dari fintech system adalah Fintech Lending atau Peer-to-Peer Lending atau Pinjaman online. Fintech Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima

pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Besarnya kebutuhan modal di Indonesia menjadikan platform peer-to-peer lending ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan platform Fintech lainnya. Beberapa contoh Financial technology dengan platform peer-to-peer lending yang mendominasi di Indonesia seperti Investree, Amartha, Modalku, dan masih banyak lagi.

Salah satu hal yang menjadi keunggulan dari Fintech peer-to-peer lending ini adalah kemudahan yang diberikan kepada masyarakat. Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seperti membukakan pintu baru untuk masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbeda dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank yang terbilang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah,

fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Fintech system cukup menawarkan dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, semua orang dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk menuntaskan berbagai problema keuangan termasuk kekurangan modal. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Dalam data tersebut terlihat bahwa petani rempah masih belum mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh fintech system seperti kemudahan dan kecepatan waktu yang dibutuhkan.

Minimnya pengetahuan dan informasi yang diterima masyarakat membuat masyarakat tidak mengerti tentang kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh teknologi saat ini. Hal ini tentunya membuat masyarakat akan tetap memilih ke jalan konvensional dan enggan untuk beralih ke digitalisasi. Namun dengan kelebihanannya tersebut masyarakat juga harus memiliki literasi keuangan yang cukup kuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat banyak sekali platform ilegal

yang tidak terdaftar di OJK beredar dimana-mana. Hal ini harus diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terjadi adanya tindak penipuan, bunga yang tinggi diluar ketentuan, keamanan data, dan lainnya. Literasi keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan penerapan inklusi keuangan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan survey penelitian ke beberapa informan terkait permasalahan inklusi keuangan pada petani rempah di Sumenep maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani rempah di daerah tersebut masih awam akan inklusi keuangan seperti petani tidak memanfaatkan layanan perbankan. Terdapat beberapa hambatan inklusi keuangan seperti minimnya pengetahuan masyarakat, kekhawatiran masyarakat terkait tingginya biaya pelayanan dan cicilan tiap bulannya untuk pinjaman modal., selain karena rasa takut dalam berurusan dengan pinjaman mereka juga belum mengetahui secara detail mengenai tata cara dan prosedur dalam peminjaman yang sesuai dengan OJK.

Namun terdapat beberapa petani rempah yang mengenal dan mengetahui terkait jasa peminjaman, tapi tetap saja tidak mau dalam meminjam modal sebagai bertani karena menganggap dengan meminjam modal maka akan

membebani petani mengingat harus membayar tagihan setiap bulannya yang terkadang tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2017. Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial teknologi (PBI Tekfin). Jakarta.
- Bedjo Santoso, dan Ahmed Kameel Mydin Meera. 2017. Strategi Pembangunan Inklusi Keuangan di Indonesia. vol 6. no 1 (Januari 2017).
- Fikqi Indra Adi Waluyo, dan Maria Assumpta Evi Marlina. 2019. Peran Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. Media Akutansi dan Perpajakan Indonesia. Vol 1, no 1.
- Gross, MB et.al. 2012. Use of Financial Services by The Unbanked and Underbanked and The Potential for Mobile Financial Services Adoption. Federal Reserve Bulletin.
- Hasan, I., De Renzis, T., dan Scheimedel, H. 2012. Retail Payments dan Economic Growth. Bank of Finland Research Discussion Paper (19).
- Imam Wahyudi. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Dalam Kesuksesan Usaha Jasa Mikro-Kecil Di Sekitar Kampus Uin Alauddin Makassar.
- Indah Asrowati Ningrum. 2018. Analisis Faktor Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Kota Makassar.
- Ivatury, G., dan Mas, I. 2008. The Early Experience With Brancless Banking. Washington DC, CGAP.
- Kaloom Zulfiqar, Muhammad Aslam Chaudhary And Aribah Aslam. 2016. Financial Inclusion And Its Implication For Inclusive Growth In Pakistan Pakistan Economic and Social Review Volume 54, No. 2 (Winter 2016), pp. 297-325.

- Khairul Anwar, dan Amri. 2017. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, vol 2, no 3 (Agustus 2017).
- M. Mostak Ahamed1 and Sushanta Mallick. 2015. Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. *JEL Classification: G21; G28; O16* Keywords: Financial inclusion; Bank stability; Bank competition; Institutional quality; Economic growth.
- Mandira Sarma dan Jasim Pais. 2008. *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis*. Indian Council for Research on International Economic Relations, Core 6A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110003, India Ph: +91 11 24 64 52 18.
- Novita Anjarsari. 2010. *Perspektif Keuangan Islam Menghadap Krisis* Keuanagn Global Tinjauan Konseptual. Universitas Negeri Surabaya.
- Onaolapo A. R. Ph.D. 2015. Effects Of Financial Inclusion On The Economic Growth Of Nigeria (1982-2012). Vol.3, No.8 pp.11-28, September 2015. *International Journal of Business and Management Review*. Published by European Centre for Research Training and Development UK.
- Sandra Carolina Férez Blando And Fernando Alonso Guinea. 2013. *Linking Financial Inclusion and Development*. Universidad Complutense Madrid.
- Sandra J. Huston. 2010. Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, Vol. 44, No. 2, 2010.
- Titiharuw, I.S., dan Atje, R. 2009. *Payment Sistem in Indonesia: Recent Developments and Policy Issues*. ADBI Working Paper Series (149).